

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan usaha pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam melaksanakan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi yang ada dalam negeri harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijakan serta langkah-langkah untuk membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembangunan daerah dalam era reformasi ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dan perlu ditingkatkan karena pembangunan daerah sebagai bagian keseluruhan dari pembangunan nasional, sehingga tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Amanah Undang-Undang agar pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Wujudnya adalah melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat terwujud dengan melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dan batas wewenang yang diberikan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjamin terlaksananya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dengan meningkatkan PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sumber pendapatan daerah yang salah satunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD-nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan lain-lain milik pemerintah daerah (pemda) seperti penjualan aset tetap daerah, pendapatan denda pajak, penerimaan bunga deposito, dan jasa giro.

Untuk meningkatkan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah perlu dilakukan upaya yang efektivitas dan efisiensi terhadap penerimaan pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Pangkalpinang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber daya ekonomi di Kota Pangkalpinang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Letaknya yang strategis dimana terletak dipusat jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara di Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang yang merupakan kota terbesar di Kepulauan Bangka Belitung mampu bersaing dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa. Sehingga banyak masyarakat baik yang berasal dari Kota Pangkalpinang maupun dari kota lainnya untuk menjalankan bisnis di Kota Pangkalpinang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Dinas Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan, pelaksanaan pelayanan teknis administrasi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015

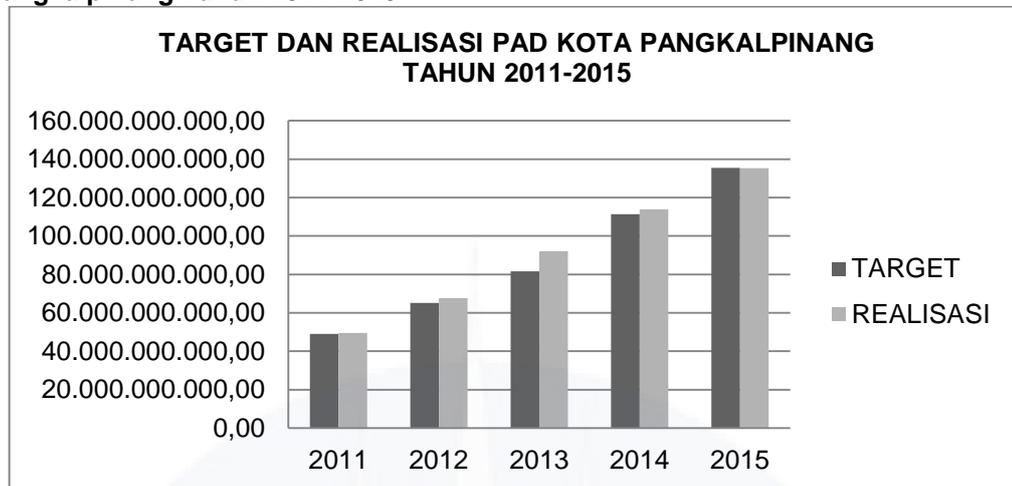
TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI
2011	48.994.526.648,00	49.534.023.294,62	101,10 %
2012	65.094.072.000,00	67.616.225.250,49	103,87 %
2013	81.554.926.490,00	92.106.752.248,02	112,94 %
2014	111.294.287.826,51	113.817.278.385,97	102,27 %
2015	135.492.246.486,70	135.305.782.559,87	99,86 %

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang, Oktober 2016.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, maka diketahui selama periode 5 tahun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang selalu mencapai target dan melebihi target yang ditetapkan pemerintah daerah, pertumbuhan PAD Kota Pangkalpinang dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan atau kenaikan tetapi saat dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 PAD Kota Pangkalpinang mengalami penurunan pertumbuhan PAD, realisasasi saat tahun 2014-2015 tidak melebihi realisasi penerimaan PAD pada tahun 2013 dan targetnya tidak tercapai saat tahun 2015. Diketahui juga bahwa penerimaan PAD Kota Pangkalpinang rendah, kontribusi yang mendominasi pendapatan daerah Kota Pangkalpinang adalah dana perimbangan. Dengan hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Pangkalpinang masih sangat bergantung oleh dana yang diberikan pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah dan kebutuhan daerah.

Agar terlihat lebih jelas dan mudah dipahami pertumbuhan pendapatan PAD Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada diagram 1.1 rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2015 dibawah ini:

Gambar 1.1
Diagram Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang, Oktober 2016

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan suatu daerah dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sawani selaku kasubbag perencanaan evaluasi dan pelaporan bagian sekretaris DPPKAD Kota Pangkalpinang beliau membenarkan pertumbuhan penerimaan PAD Kota Pangkalpinang selama 5 tahun mengalami penurunan dan beliau juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang masih sangat bergantung terhadap penerimaan dana dari pemerintah pusat. Penurunan pertumbuhan PAD tersebut dikarenakan target PAD Kota Pangkalpinang setiap tahunnya terlalu tinggi tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi dan akan terjadi kedepannya di Kota

Pangkalpinang, karena Kota Pangkalpinang berbeda dengan daerah lainnya tidak ada pendapatan daerah yang bersumber dari sumber daya alam daerah itu sendiri.

PAD Kota Pangkalpinang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan beberapa hal salah satunya adalah realisasi sumber PAD yang tidak mencapai target. Kontribusi tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang adalah lain-lain PAD yang sah, pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan kontribusi terendah dari PAD Kota Pangkalpinang adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi sumber PAD yang tidak mencapai target dan sulitnya terealisasi dengan baik tersebut di Kota Pangkalpinang adalah retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini khususnya retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2015

TAHUN	JENIS PAD	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2011	Retribusi daerah	8.581.575.000,00	6.861.165.365,36
	Lain-lain PAD yang sah	20.986.051.648,00	16.999.010.613,20
2012	Retribusi daerah	12.987.585.562,00	12.310.322.655,66
	Lain-lain PAD yang sah	27.144.596.430,00	22.732.526.933,84
2013	Retribusi daerah	15.016.298.500,00	16.134.938.007,00
	Lain-lain PAD yang sah	28.518.627.990,00	24.152.261.809,03
2014	Retribusi daerah	15.194.021.000,00	16.455.668.909,66
	Lain-lain PAD yang sah	46.925.266.826,51	42.474.630.944,21
2015	Retribusi daerah	17.712.600.000,00	16.933.544.415,66
	Lain-lain PAD yang sah	52.979.646.486,70	56.978.849.029,45

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang, Oktober 2016.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa selama periode tahun 2011-2015 penerimaan retribusi daerah Kota Pangkalpinang tidak mencapai target hanya tahun 2013 dan tahun 2014 yang mencapai target dan pertumbuhan

penerimaan retribusi daerah dari tahun ketahun tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan lain-lain PAD yang sah Kota Pangkalpinang pada periode tahun 2011-2015 penerimaan realisasinya juga tidak mencapai target hanya pada tahun 2015 yang penerimaannya mencapai target. Tetapi pertumbuhan lain-lain PAD yang sah berbeda dengan retribusi daerah berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan lain-lain PAD yang sah selalu meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sawani selaku kasubbag perencanaan evaluasi dan pelaporan bagian sekretaris DPPKAD Kota Pangkalpinang dan Bapak Dede selaku bagian penerimaan dan pengelolaan BPHTB bahwa penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah memang tidak stabil setiap tahunnya dan sulit untuk teralisasi dengan baik berdasarkan tujuan yang diinginkan pihak DPPKAD Kota Pangkalpinang. Permasalahan tentang tidak tercapainya atau terealisasi suatu target retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tersebut mereka mengatakan bahwa target yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban, pertumbuhan usaha di Kota Pangkalpinang sangat lemah, pemungutan penerimaan PAD kurang maksimal, banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi tidak melaporkan kegiatan transaksi tersebut kepada petugas, pengaruh kondisi alam, dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan dan fenomena yang tertuang pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dari tahun 2011-2015 yang peneliti tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang Periode 2011-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi atau gambaran retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015?
4. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015?

1.3 Batasan Masalah

Agar memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut:

1. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pangkalpinang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2011-2015.
2. Penelitian ini hanya meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan atau gambaran retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015.
4. Untuk menguji secara simultan pengaruh antara Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang periode 2011-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Ekonomi dan Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan kajian tentang keuangan daerah, serta dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam mengelola keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah atau Instansi terkait dalam menentukan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran pembahasan secara singkat dari masing-masing bab yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap masalah. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang mendasari dalam analisis penelitian ini, seperti teori tentang manajemen keuangan, manajemen keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Pada bab ini juga mengemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolonieritas,), regresi linear berganda, uji determinasi, dan pengujian hipotesis (uji T dan uji F).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang sejarah singkat perusahaan / instansi yang menjadi tempat objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang tahun 2011-2015.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan penjelasan tentang gambaran hasil analisis dan saran yang diberikan penulis sebagai bahan masukan pada perusahaan/instansi yang diteliti. Sedangkan kesimpulan dari hasil analisis sebagai pertimbangan manajemen perusahaan/instansi dan memperkaya konsep serta teori bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.